

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya, terdiri dari 17.508 buah pulau dan memiliki luas wilayah perairan yang mencapai 5,8 juta km² dengan garis pantai 81.000 km sehingga menjadikan Indonesia memiliki potensi perikanan dan kelautan yang luar biasa kualitasnya (<http://www.mgi.esdm.go.id/> 2014, tanggal 27 September 2014 pkl. 07.30 wib). Indonesia merupakan salah satu negara produsen untuk ekspor produk perikanan. Sebab sektor perikanan dan kelautan mempunyai nilai yang cukup baik bagi peningkatan ekonomi di Indonesia. Salah satu komoditas perikanan yang di ekspor Indonesia adalah udang.

Udang merupakan salah satu produk unggulan komoditas perikanan yang sangat digemari oleh konsumen dalam negeri maupun luar negeri. Produksi udang adalah salah satu jenis produksi non migas yang diunggulkan oleh Indonesia. Sejak tahun 2004 hingga saat ini Indonesia lebih banyak mengekspor udang beku ataupun segar dibandingkan dalam bentuk kemasan dalam pengembangan komoditas unggulan ekspor.

Jenis-jenis udang yang dihasilkan oleh Indonesia adalah udang putih (*Banana Prawn, Penaeus merguensis, penaeus indicus*), udang dodol (*Metapenaeus Shrimps, Metapeneus spp*), udang vanname dan udang windu (*Giant tiger prawn, Penaeus monodon, penaeus semisulcatus*). Jenis udang yang dieskpor ke Amerika Serikat adalah jenis udang vanname yang dipasarkan dalam bentuk udang beku (*frozen shrimp*).



Sumber : KKP

Gambar 1 Daerah-daerah Penghasil Udang di Indonesia

Berdasarkan pada gambar di atas dapat dilihat bahwa peta tersebut menunjukkan daerah-daerah yang menghasilkan udang vannamee di Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil udang vannamee yang menjadi komoditas utama perikanan Indonesia untuk di ekspor ke pasar internasional.

Bila dibandingkan dengan negara tujuan ekspor Indonesia ke negara lainnya, maka negara Amerika Serikat yang merupakan pasar ekspor utama terbesar dalam penghasilan perikanan Indonesia khususnya pada komoditas udang. Ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat tentu tidak mudah karena adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Jika di lihat data perkembangan ekspor udang dari tahun 2008-2010 ke Amerika Serikat yaitu sebagai berikut :

Tabel 1 Volume Ekspor Udang Indonesia ke Negara Tujuan Tahun 2008-2013

No	Negara	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		Volume (Kg)					
Satuan: Volume (Kg)							
1	Amerika Serikat	77.203.400	63.592.017	58.276.323	70.058.677	62.533.608	82.533.631
2	Jepang	35.734.221	33.935.695	32.209.662	215.354	39.084.252	39.481.055
3	Uni Eropa	20.224.883	16.570.559	13.591.654	10.402.298	16.359.459	18.231.649
4	China	5.505.465	1.596.499	5.906.879	5.636.784	6.366.285	5.823.918

Sumber: Pusat Data Statistik dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Tabel 1 volume ekspor udang Indonesia ke AS pada tahun 2012 mengalami penurunan dalam mengekspor udang dengan jumlah 62.5333.608 kg. Padahal pada tahun 2011 Indonesia mengekspor ke AS sebesar 70.058.677 kg. Salah satu penurunan volume/kg dikarenakan adanya tuduhan dari AS terhadap subsidi ekspor udang Indonesia, maka terjadi hambatan ekspor ke AS selama proses investigasi berjalan sehingga terjadi penurunan volume/ton di tahun 2012.

Tabel 2 Nilai Ekspor Udang Indonesia ke Negara Tujuan Tahun 2008-2013

No	Negara	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		Nilai (USD)					
Nilai: 000 USD							
1	Amerika Serikat	547.627.490	426.995.485	443.219.386	615.055.028	590.871.720	882.772.355
2	Jepang	310.458.664	297.498.768	330.360.134	366.603.229	426.736.098	465.650.412
3	Uni Eropa	128.040.552	96.804.911	97.018.263	86.711.599	111.911.442	151.343.574
4	China	23.809.571	8.022.533	11.758.681	24.542.349	41.606.636	59.648.292

Sumber: Pusat Data Statistik dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kelautan dan Perikanan

Bila dilihat dari Tabel 2 di atas berdasarkan perkembangan ekspor udang Indonesia ke AS di tahun 2008 sebesar 547.627.490 USD, pada tahun 2009 sebesar 426.995.485 USD. Sementara itu pada tahun 2010 nilai ekspor sebesar 443.219.386 USD, dan di tahun 2011 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 615.055.028 USD. Namun pada perkembangannya terjadi penurunan nilai ekspor udang ke Amerika Serikat di tahun 2012 nilai ekspor udang Indonesia ke AS 590.871.720 USD.

Hal ini salah satunya disebabkan pada tahun 2012 Indonesia mengalami tuduhan dari AS bahwa Indonesia telah memberikan subsidi kepada perusahaan domestiknya. Terkait dengan udang beku yang diekspor ke Amerika Serikat sehingga membuat produk udang Indonesia lebih murah dibandingkan udang domestik AS. Harga udang Indonesia di AS berkisar Rp. 80 ribu per kilo sedangkan udang domestik AS berkisar 8 USD (<http://www.customsjakarta.com/>, 09 September 2014, pk1 15.48 wib). Pihak AS merasa tidak mendapatkan keadilan dalam perdagangan udang tersebut sebab mengancam industri udang domestiknya, akibatnya terjadi dumping di pasar AS.

Dumping adalah kegiatan yang dilakukan oleh produsen atau pengeksport yang melakukan penjualan barang di luar negeri (Negara pengimpor) dengan harga yang lebih rendah dari

harga normal produk yang sejenis di Negara bersangkutan sehingga menimbulkan kerugian terhadap Negara pengimpor (Sood 2011, hlm.47).

Untuk mengantisipasi adanya praktik dumping maka diperlukan suatu tindakan yang disebut dengan anti dumping adalah suatu tindakan balasan yang diberikan oleh Negara pengimpor terhadap barang dari Negara pengekspor yang melakukan dumping. Pengenaan bea masuk anti dumping adalah pungutan yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian.

Sebab dalam ketentuan WTO (*World Trade Organization*) prinsip *fairness* sangat diutamakan, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya praktik persaingan curang dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, dalam perdagangan internasional pada dasarnya dumping dilarang karena dianggap dapat merugikan perekonomian Negara lain (Syahyu 2004, hlm.45).

Menurut pasal 1 ayat (1) a) persetujuan tentang subsidi dan tindakan imbalan (*agreement on subsidies and countervailing measures*), bahwa pengertian subsidi adalah kontribusi finansial oleh pemerintah atau badan pemerintah dalam wilayah anggota meliputi (Dirdjosoebroto 2004, hlm.242) :

- a. Suatu kegiatan pemerintah melibatkan penyerahan dana secara langsung, seperti hibah, pinjaman dan penyerahan atau pemindahan dana atau kewajiban secara langsung, misalnya jaminan uang
- b. Pendapatan pemerintah yang seharusnya sudah dibayar menjadi hapus atau tidak ditagih misalnya insentif fiskal, seperti keringanan pajak.
- c. Pemerintah menyediakan barang atau jasa selain dari infrastruktur atau pembalian barang.
- d. Pemerintah melakukan pembayaran pada mekanisme pendanaan atau menunjuk suatu organisasi atau badan swasta untuk melaksanakan satu atau lebih jenis fungsi sebagaimana yang disebutkan dalam butir a sampai c di atas, yang diberikan pada pemerintah dan pelaksanaannya berbeda dari yang biasanya dilakukan oleh di Pemerintah.

Pada dasarnya pemberian subsidi mempunyai dua tujuan menurut Dirdjosoebroto (2004, hlm.242) yaitu:

- a. Untuk mendorong pertumbuhan ekspor agar pengusaha yang memperoleh subsidi dapat memproduksi produk dengan biaya yang lebih rendah/murah, sehingga produk tersebut dapat di ekspor dengan harga

yang dapat bersaing dengan produk serupa dari negara pengimpor dari negara ketiga lainnya

- b. Untuk mengurangi impor artinya bahwa pemberian subsidi terhadap komponen produk tertentu yang diproduksi di dalam negeri mendorong produsennya untuk tidak lagi membeli komponen produk serupa dari luar negeri. Meskipun demikian, subsidi seperti ini tidak menjamin bahwa produk local tersebut akan benar-benar baik kualitasnya dan rendah harganya dibandingkan dengan produk impor.

Proses penerapan bea masuk imbalan dengan melakukan penyelidikan dan pembuktian adanya kerugian mengenai adanya kerugian materill sebagai akibat dari produk impor subsidi yang merupakan bagian dari proses penerapan bea masuk imbalan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam *code on subsidies and countervailing duties* (article VI GATT), menurut Dirdjosoebroto (2004, hlm.242) bahwa negara yang terkena dampak subsidi dapat yaitu :

- a. Melakukan "*injury test*" yaitu penyelidikan dan pembuktian tentang adanya keruian materill
- b. Melakukan pengujian yang objektif tentang pengaruh harga barang impor terhadap produk domestic
- c. Mengajukan permintaan tertulis kepada negara yang melakukan subsidi bahwa akan melakukan *contervaiilling duty* dengan disertai keterangan sebagai berikut :
 - a) Subsisi yang telah dikenakan terhadap barang ekspor tertentu
 - b) Jumlah kerugian materill yang diduga telah diderita oleh *industry domestic*.

Tuduhan subsidi dari pihak AS yang tergabung dalam koalisi yaitu *Coalition of Gulf Shrimp Industries* (COGSI), COGSI adalah asosiasi produsen udang domestik di AS yang membentuk suatu koalisi yang mewakili industri di seluruh negara pesisir Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina dan Texas (<http://www.gulfshrimpcoalition.com/> 2013, 04 Oktober 2014 pkl 08.40 wib). Berikut ini adalah tuduhan dari AS terhadap subsidi ekspor udang Indonesia oleh COGSI antara lain (<http://suarapengusaha.com/2013/01/27/ini> -

tuduhan-amerika-pada-industri-udang-indonesia// 2013, 07 Oktober 2014, pkl 16.07 wib) :

- a. Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia telah mengalokasikan US\$112 juta sebagai dana stimulus yang merupakan bagian rencana memperbaiki produksi perikanan segar dan olahan dari tahun 2010. Menurut sebuah laporan, KKP juga berencana mengeluarkan biaya hampir US\$3 miliar selama 5 tahun berikutnya untuk sektor perikanan. Tetapi di dalam aturan WTO dilarang, sebab pemerintah tidak boleh memberikan subsidi berupa bantuan kepada perusahaan.
- b. Pemerintah Indonesia menyediakan peralatan mahal bagi nelayan dan petambak. Dimana situs resmi kementerian menyajikan banyak contoh subsidi lainnya, termasuk penyediaan kapal penangkap ikan, alat tangkap, fasilitas dan peralatan penyimpanan, sertifikat tanah dan kredit. KKP juga merevitalisasi tanggul tambak udang seluas 170.844 ha pada 2011. Di antara program pendampingan pemerintah, terdapat penyediaan sarana produksi yang murah, dimana adanya bantuan modal dan sistem insentif untuk di ekspor.
- c. Pada Desember tahun 2010 lalu, pemerintah Indonesia membuka pusat pembibitan udang terbesar di dunia yaitu di daerah Bali yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor bibit udang dan menekan biaya produksi petambak. Pusat pembibitan itu didesain memproduksi 675.000 ton per tahun, volume yang cukup untuk memasok sebagian besar kebutuhan industri benih udang.
- d. Perusahaan negara Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) menyediakan asuransi kredit ekspor untuk semua sektor, kecuali minyak dan gas, dan mengganti kerugian eksportir hingga 85%.
- e. Eksportir Indonesia mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi bahan baku yang diolah untuk diekspor. Insentif pajak dan bea ini dianggap subsidi menurut hukum AS.
- f. CP adalah sebagai eksportir terbesar udang beku yang melaporkan telah menandatangani kesepakatan kerjasama dengan berbagai bank milik

pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi investasi dan kebutuhan modal kerja petambak udang.

Berdasarkan tuduhan-tuduhan yang sudah dijelaskan diatas, Pemerintah Indonesia telah melakukan diplomasi agar hubungan kedua negara dalam bidang ekspor udang vanname Indonesia ke AS dapat normal kembali serta tuduhan terhadap subsidi ekspor udang tidak benar.

Salah satu upaya diplomasi Indonesia yang telah berhasil dalam menyikapi tuduhan AS antara lain dengan mengadakan pertemuan pada tanggal 5-7 Mei 2013 antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo dengan Fransisco J. Sanchez sebagai ketua dari *Under Secretary Commerce for International Trade (US-DOC)* (KKP RI 2013, hlm.1).

Dalam pertemuan tersebut Pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa bantuan subsidi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pembudidaya udang, para nelayan dan petambak yang ada di Indonesia menjadi lebih sejahtera, serta menurunkan angka pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan.

I.2 Perumusan Masalah

Seperti yang sudah dijelaskan di atas tuduhan subsidi terhadap ekspor udang vaname Indonesia ke Amerika Serikat maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah: Bagaimana bentuk diplomasi Indonesia sehingga berhasil dalam menyikapi tuduhan Amerika Serikat terhadap subsidi ekspor komoditas udang beku vanname Indonesia ke AS Periode 2011-2013 ?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Menjelaskan penurunan nilai ekspor udang Indonesia di tahun 2012 akibat tuduhan subsidi Amerika Serikat.
- b. Menjelaskan bentuk penyelesaian diplomasi Indonesia dalam menyikapi tuduhan Amerika Serikat terhadap subsidi ekspor udang vanname Indonesia ke Amerika Serikat.

I.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para peneliti yang memiliki minat pada permasalahan yang diangkat oleh penulis dan tulisan ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi. Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu :

- a. Secara praktis tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi bagi para mahasiswa Hubungan Internasional pada khususnya mengenai Bentuk Diplomasi Indonesia Dalam Menyikapi Tuduhan Amerikas Serikat Terhadap Subsidi Ekspor Komoditas Udang Vanname Indonesia ke AS periode 2011-2013.
- b. Secara akademis manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan data di dalam jurusan Hubungan Internasional yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

I.5 Tinjauan Pustaka

Begitu banyak literatur yang telah mengkaji dan membahas tentang bentuk diplomasi Indonesia dalam menyikapi tuduhan Amerika Serikat terhadap subsidi ekspor udang beku ke AS, adapun beberapa sumber yang dijadikan tinjauan bagi penulis antara lain :

Menurut Muhammad Yasin dalam jurnalnya yang berjudul Prospek Usaha Budidaya Udang Organik 2013, menjelaskan bahwa pasar ekspor utama udang Indonesia yaitu Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Selama ini negara tujuan utama ekspor udang Indonesia adalah Jepang sekitar 60 persen dari total ekspor. Pada tahun 1998 Jepang mengimpor udang 238.900 ton, dan Indonesia sebagai pemasok utama dengan pangsa pasar 22,48 persen.

Diantara produk perikanan dan kelautan, udang merupakan komoditas primadona yang berpotensi ekspor dan menghasilkan devisa bagi negara. Berdasarkan data dari Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, bahwa lebih dari 50 persen devisa dari sektor perikanan berasal dari komoditas udang (dari berbagai jenis). Namun demikian, komoditas ini sering mengalami pasang surut, baik produksi maupun pemasarannya. Industri udang Indonesia yang mengalami masa pasang surut, terutama setelah merebaknya serangan *White*

Spot salah satu jenis virus yang menghancurkan usaha budidaya udang windu di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama pantai utara Jawa yang menerapkan pola intensif.

Sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensi Indonesia sebagai produsen dan eksportir udang di dunia, serangkaian penelitian dan percobaan terus dilakukan, dan akhirnya melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.41/2001. Maka pada tanggal 12 Juli 2001 pemerintah secara resmi melepas udang *Vannamei* (*Vanname*) sebagai varietas yang unggul untuk dibudidayakan petambak di Indonesia. Kelebihan dari udang *vanname* antara lain lebih tahan terhadap virus bintik putih, pertumbuhan lebih cepat, tahan terhadap kondisi lingkungan, waktu pemeliharaan relatif pendek yakni sekitar 90-100 hari per siklus, tingkat *survival rate* (SR) atau derajat kehidupannya tergolong tinggi.

Kehadiran udang *vaname* tidak hanya menambah pilihan bagi petambak, tetapi juga menopang kebangkitan usaha budidaya udang di Indonesia dan diharapkan dapat membuat investasi di bidang pertambakan udang bergairah kembali. Udang *vaname* merupakan komoditas pengganti udang windu yang sensitive terhadap beberapa jenis virus. Bila kondisi tambak di Indonesia sudah normal (bebas serangan virus bintik putih), udang windu akan dibudidayakan kembali, karena udang windu merupakan andalan ekspor Indonesia tiga dasawarsa terakhir.

Selain serangan virus bintik putih, ada beberapa masalah lain yang kerap melanda industri udang di Indonesia mulai dari hulu sampai hilir. Salah satu contoh adalah adanya penolakan terhadap produk udang Indonesia di sejumlah negara Eropa karena terkait masalah lingkungan. Mereka mensinyalir tambak udang Indonesia sebagian besar dibangun dengan mengorbankan hutan mangrove dan nipa. Penolakan terhadap produk udang lainnya dilakukan oleh Jepang karena terkait dengan isu kesehatan, diduga udang Indonesia mengandung sisa zat kimia akibat penggunaan pestisida yang tidak terkontrol.

Jurnal ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis. Perbedaan tersebut terletak pada permasalahan penyelesaian bentuk diplomasi Indonesia. Dalam jurnal ini hanya membahas kinerja prospek budidaya

udang vanname untuk di ekspor ke negara AS. Maka dari itu jurnal tersebut penulis akan masukan ke dalam Bab II pembahasan skripsi penulis.

Menurut Deasi Natalia dengan jurnalnya yang berjudul *The Competitiveness of Indonesia's Fishery Products in the Global Market* (Natalia 2012, hlm 6), menjelaskan bahwa di pasar perikanan dunia, Indonesia merupakan salah satu negara eksportir utama. Sebagai negara dengan luas daratan dan lautan serta pantai yang cukup panjang, komoditas perikanan merupakan cukup penting bagi Indonesia. Sehingga kondisi alam Indonesia memungkinkan masyarakat untuk menangkap dan membudidayakan ikan di seluruh wilayah tanah air. Karena itu tidaklah mengherankan apabila Indonesia merupakan salah satu Negara produsen perikanan utama dunia.

Ditinjau dari aspek ekonomi, menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap PDB harga yang berlaku selama periode 2004-2008 berkisar 2,15%- 2,77%. Sektor perikanan juga menjadi penyedia lapangan pekerjaan dan sumber devisa dan investasi. Dalam pasar internasional saat ini, Indonesia merupakan salah satu eksportir produk perikanan utama dengan menempati posisi peringkat 12. Saat ini terdapat gambaran bahwa walaupun Indonesia merupakan salah satu negara produsen ikan dunia dengan potensi produksi yang cukup besar, akan tetapi belum dapat memanfaatkan potensi pasar internasional yang ada, bahkan berada dibawah Thailand dan Vietnam, yang masing-masing menempati peringkat 3 dan 5.

Hal ini disebabkan karena produk perikanan Indonesia memiliki daya saing yang lebih rendah dibandingkan dengan produk dari kedua negara tersebut, khususnya produk-produk perikanan olahan. Bahan baku perikanan yang berkualitas tinggi disatu sisi dan produk perikanan yang berdaya saing rendah disisi lain jelas merupakan permasalahan penting, dan relevan untuk diteliti lebih lanjut.

Terjadinya persaingan pasar yang semakin ketat dewasa ini sebagai dampak globalisasi perdagangan dunia mendorong setiap negara untuk mengambil langkah-langkah yang efektif guna meningkatkan daya saing produknya. Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) dan tenaga kerja yang melimpah dengan upah yang kompetitif, yang merupakan faktor pendukung daya saing. Namun demikian

kedua hal tersebut ternyata tidak cukup untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Disisi lain ada negara Thailand dan Vietnam yang merupakan contoh negara yang sumber daya ikan relative terbatas dibanding Indonesia. Akan tetapi pada lingkup global, daya saing komoditas perikanan kedua Negara tersebut lebih tinggi dari daya saing komoditas perikanan Indonesia.

Apabila melihat kondisi Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan pantai yang cukup panjang dibandingkan dengan kedua negara anggota ASEAN tersebut, seyogyanya Indonesia mampu meningkatkan perannya yang baik dalam produksi maupun ekspor komoditas perikanan.

Ekspor udang Indonesia ditujukan terutama ke Amerika Serikat, Jepang, Belgia, Hongkong, dan Perancis. Sehingga pada tahun 2010 nilai ekspor udang ke pasar internasional lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan pada periode tahun sebelumnya. Namun di pasar Amerika Serikat Indonesia hanya memasok sekitar lima persen kebutuhan udang, atau masih kalah dibandingkan dengan Thailand dan Ekuador. Hal ini dikarenakan Indonesia menjadi pengeksport udang terbesar di pasar Jepang, meski sejak 1998 kemudian mulai disusul oleh India yang sebenarnya baru secara gencar membudidayakan udang.

Hal serupa mengindikasikan adanya kelemahan daya saing udang Indonesia dibandingkan daya saing udang Thailand. Indikasi ini bahwa daya saing pasar ekspor Indonesia secara umum diduga masih lemah, sehingga kalah bersaing dengan produk sejenis yang dihasilkan oleh Negara-negara pesaing Indonesia. Kelemahan yang dihadapi oleh Indonesia dalam pembangunan sector perikananannya, antara lain terjadinya *over fishing*, masih lemahnya armada tangkap nasional, serta masih maraknya aksi *illegal fishing*.

Jurnal ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis. Perbedaan tersebut terletak pada permasalahan penyelesaian bentuk diplomasi pemerintah Indonesia. Dalam jurnal ini hanya membahas pasar ekspor udang Indonesia di AS yang mempunyai daya saing yang masih rendah sebab ada Negara Vietnam dan Thailand yang menjadi daya saing bagi Indonesia. Maka diperlukan kinerja daya saing yang perlu dilakukan untuk Indonesia agar ekspor perikanan Indonesia bisa menjadi nomor satu di dunia. Sebab Indonesia adalah Negara kepulauan yang banyak menghasilkan produk perikanan yang jauh lebih

baik. Dalam jurnal tersebut banyak data-data yang penulis akan masukan sebagai bahan pendukung di dalam Bab II pembahasan skripsi penulis.

Selanjutnya menurut Kharif Rahman 2013 di dalam jurnalnya yang berjudul Persengketaan Perdagangan Antara Indonesia Dan Amerika Serikat Dalam Ekspor Udang Ke Amerika Serikat Tahun 2010-2013, menjelaskan bahwa persengketaan perdagangan yang terjadi antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat dikarenakan adanya tuduhan pemberian subsidi oleh pihak produsen udang di Indonesia.

Tuduhan subsidi ekspor udang Indonesia yang dituduhkan oleh pihak AS, sebenarnya pemerintah Indonesia sudah membantah bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan tidak adil bagi perdagangan bebas yang sudah ada dan memberatkan pihak Indonesia. Sebab peran pemerintah Indonesia dalam bidang perikanan khususnya udang adalah bukan memberikan bantuan seperti subsidi yang bertujuan untuk menekan harga udang Indonesia menjadi lebih murah di pasar internasional, tetapi bantuan yang diberikan pemerintah Indonesia adalah untuk memberdayakan para nelayan dan petambak yang ada di Indonesia menjadi lebih sejahtera serta menurunkan angka pengangguran di Indonesia untuk memberantas tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia dengan membuka lapangan kerja di Indonesia.

Hal tersebut disebabkan banyaknya produk impor komoditas udang dari berbagai negara yang masuk ke Amerika Serikat yang ternyata membuat pengusaha dan para nelayan disana yang tergabung dalam *Coalition of Gulf Shrimp Industries/COGSI* tidak bisa berkompetisi dalam bersaing dengan produk impor udang AS karena dijual dengan harga yang lebih murah.

Jurnal ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis. Perbedaan tersebut terletak pada topik yang akan diangkat penulis yaitu pada penyelesaian bentuk diplomasi pemerintah Indonesia dalam menyikapi tuduhan AS terhadap subsidi udang Indonesia ke AS. Sementara itu di dalam sumber diatas hanya menjelaskan faktor yang menyebabkan persengketaan dagang yang terjadi antara Indonesia dan Amerika Serikat. Jadi, bentuk penyelesaian upaya diplomasi pemerintah Indonesia tidak terlihat dalam jurnal ini. Dalam jurnal tersebut banyak data dan sumber untuk dimasukan sebagai bahan pendukung di dalam latar belakang masalah dan Bab II skripsi penulis.

I.6 Kerangka Pemikiran

I.6.1 Teori Kepentingan Nasional Ekonomi

Menurut Morgenthau, “Teori Kepentingan Nasional adalah kemampuan negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain” (Morgenthau 1951, hlm.105).

Teori Kepentingan Nasional (*National Interest*) menurut Daniel S.Papp adalah dalam kepentingan nasional terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideology, kekuatan, dan keamanan militer, moralitas dan legalitas. Maka dalam hal ini, yang mana faktor ekonomi pada setiap kebijakan yang diambil oleh suatu negara selalu berusaha untuk meningkatkan perekonomian negara yang dinilai sebagai suatu kepentingan nasional. Suatu kepentingan nasional dalam aspek ekonomi diantaranya adalah untuk meningkatkan keseimbangan kerja sama perdagangan suatu negara dalam memperkuat sektor industry, dan sebagainya (Papp. 1998, hlm.29).

Kepentingan nasional (*National Interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa dan negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relative tetap dan sama diantara semua negara dan bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu keamanan (*security*) dari kesejahteraan (*prosperity*) (Rudy 2002, hlm.116).

Kepentingan nasional diidentikkan dengan dengan “tujuan nasional”. Contohnya kepentingan pembangunan ekonomi, kepentingan pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau kepentingan mengundang investasi asing untuk mempercepat laju industrialisasi. Mengingat bahwa Indonesia negara bangsa yang berdaulat, maka sangatlah janggal bila Indonesia tidak memiliki kepentingan nasional khususnya ekonomi. Konfigurasi negara yang berbentuk kepulauan terbesar, kedudukan geopolitik, luas wilayah dan jumlah penduduk terbesar keempat didunia, tentulah memiliki kepentingan nasional yang besar pula.

Dalam Perpres No.7 tahun 2008 tersebut, telah ditetapkan kepentingan nasional Indonesia dalam tiga strata yaitu (Indonesia. UUD 1945, hlm.1):

- a. *Mutlak*, kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berupa integritas teritorial, kedaulatan nasional dan keselamatan bangsa Indonesia.
- b. *Penting*, berupa demokrasi politik dan ekonomi, keserasian hubungan antar suku, agama, ras dan golongan penghormatan terhadap hak azasi manusia, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

- c. *Pendukung*, berupa perdamaian dunia dan keterlibatan Indonesia secara meluas dalam upaya mewujudkannya

Hal ini terkait dengan adanya tuduhan subsidi udang Indonesia dari Amerika Serikat, maka Pemerintah Indonesia harus tegas untuk melawan tuduhan subsidi ekspor udang Indonesia ke AS demi kedaulatan ekonomi Indonesia. Program bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada nelayan dan petambak untuk pemberdayaan, bukan subsidi dan sudah menjadi tanggung jawab sebagai pemerintah Indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya serta harus memperjuangkan subsidi yang besar kepada produk Indonesia agar dapat bersaing di pasar internasional. Sebab sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 di Pembukaan (*Preamble*) alinea ke 4 yang tertulis bahwa:

Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu di dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia (Indonesia.Pembukaan UUD 1945, hlm.1).

I.6.2 Teori Diplomasi

Menurut Sumaryo, diplomasi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah sesuatu Negara untuk mencapai tujuannya dan memperoleh dukungan mengenai prinsip-prinsip yang diambilnya (Suryokusumo 1995, hlm.1-2).

Menurut Harold Nicolson, salah seorang pengkaji dan praktisi yang pandai dalam hal diplomasi di abad ke 20 mengatakan bahwa terdapat lima hal dalam diplomasi yaitu (Roy 2008, hlm.5) :

- a. Politik luar negeri
- b. Negoisasi
- c. Mekanisme pelaksanaan negoisasi tersebut
- d. Mencakup keahlian dalam pelaksanaan negoisasi internasional

Teori diplomasi merupakan salah satu praktek dalam Hubungan internasional antar negara yang melalui perwakilan-perwakilan resmi. Praktek diplomasi dapat meliputi keseluruhan proses hubungan luar negeri dan formasi kebijakan. Disebutkan bahwa diplomasi juga diartikan alat atau mekanisme kebijakan luar negeri yang dijadikan sebagai tujuan akhir, juga diartikan sebagai teknik-teknik operasional yang akan dilakukan oleh sebuah negara untuk memperjuangkan kepentingannya melalui hukum (Plano &Olton 1982, hlm.24).

Kegiatan diplomasi berkaitan erat dengan pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain karena diplomasi merupakan suatu tahapan dalam menjalankan politik luar negeri suatu negara. Kegiatan diplomasi berkaitan erat dengan pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain karena diplomasi merupakan suatu tahapan dalam menjalankan politik luar negeri suatu negara.

Dalam mempelajari diplomasi pada umumnya harus ditinjau hubungan antar negara dan politik luar negerinya, sehingga hubungan diplomasi dan politik luar negeri suatu negara mempunyai interelasi yang saling mempengaruhi satu sama lain (Plano & Olton 1982, hlm.24).

Tujuan utama suatu negara mengadakan hubungan diplomasi adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari negara lain, menjaga hubungan dengan negara lain, dan menjaga keserasian antar negara. Dalam diplomasi tingkat tinggi, dilakukan pertahanan yang biasanya dilakukan oleh aktor negara yang diwakili oleh para kepala negara yang dilakukan secara langsung dalam sebuah forum diskusi dengan aktivitas berupa penukaran ide atau gagasan. Namun seiring dengan kompleksitas masalah yang dihadapi dalam perkembangannya maka secara umum hubungan diplomatik saat ini dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui tahapan yakni pengiriman utusan berupa duta ataupun perwakilan-perwakilan yang dikirim oleh negaranya (Feiltham 1998, hlm.45).

Disamping itu dengan tujuan diplomasi sebagai pengamanan kepentingan negara sendiri. Kepentingan negara tersebut seperti dalam hal pemeliharaan keamanan, memajukan ekonomi serta perdagangan internasional, hingga pada perlindungan warga negara sendiri di negara lain. Untuk mencapai tujuan diplomasi tersebut, tentu setiap negara membutuhkan beberapa aspek yaitu kerja sama, penyesuaian, dan penentangan. Dalam hal ini, kerja sama dan penentangan dapat dengan mudah dicapai dengan menggunakan jalur negosiasi yang pada akhirnya bermuara pada sebuah hasil. Jika negosiasi tidak efektif adanya dalam mencapai tujuan diplomasi, maka opposition dapat menjadi alternatif selanjutnya. Atau dengan kata lain, jika negosiasi tidak berhasil maka perang adalah jalan alternatifnya.

Terkait dengan tuduhan subsidi utang Amerika Serikat kepada Indonesia maka pemerintah Indonesia membuat suatu upaya diplomasi perdagangan dimana pemerintah Indonesia secara konsisten dengan melakukan instrumen pendekatan

yang berupa negoisasi dan cara dalam menangani kasus tuduhan AS terhadap subsidi ekspor udang Indonesia ke AS.

I.6.3 Subsidi Ekspor Dalam Perdagangan Internasional

Menurut Huala Adolf subsidi ekspor adalah pembayaran sejumlah tertentu kepada perusahaan atau perseorangan yang menjual barang ke luar negeri, seperti tariff, subsidi ekspor dapat berbentuk spesifik (nilai tertentu per unit barang) atau (presentase dari nilai yang diekspor) (Adolf 1995, hlm.36).

Subsidi adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada industry dalam negeri dalam bentuk keirnganan pajak, pengembalian pajak, fasilitas kredit, subsidi harga. Yang bertujuan untuk menambah produksi dalam negeri, mempertahankan jumlah kondisi dalam negeri dan menjual dengan harga yang lebih murah daripada produk impor (Hady 2001, hlm.75).

Oleh karena itu, penggunaan subsidi dibatasi oleh WTO agar tidak menimbulkan hal yang merugikan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dalam negerinya suatu negara. Hal ini sebagaimana dikutip oleh Fisher dalam Taryana Sunandar bahwa, (Sunandar 1994, hlm.25) *“Subsidies are of the most trouble some problems of current international trade policy.”* Subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu menutupi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri, sehingga produsen dalam negeri dapat menjual barangnya lebih murah dan bisa bersaing dengan barang impor.

Sehubungan dengan adanya subsidi di dalam perdagangan internasional oleh sebab itu para peserta WTO menyatakan dalam *article XVI section (2)* bahwa (Soon.2001, hlm.202):

the granting by a contracting party of subsidy on the export of produk may have harmful effects for the order contracting parties, both importing and exporting, my cost undue disturbance to their normal commercial interest, and may hinder the achievement or the objectives of Agreement.

Berdasarkan pasal tersebut bahwa subsidi eskpor dianggap dapat membahayakan Negara lain, baik itu dialami oleh Negara pengimpor maupun Negara pengekspor, dan juga Negara pihak ketiga. Dalam perdagangan internasional subsidi merupakan suatu kegiatan yang dilarang, karena pada prinsipnya dalam perdagangan internasional harus bersifat fair (*fairness*). Prinsip fairness ini dimaksudkan agar suatu negara tidak membuat suatu kebijaksanaan yang memberikan keuntungan tertentu kepada negara tersebut, sehingga merugikan pihak negara lainnya.

I.6.4 Udang Vanname

Udang vanname (*Litopenaeus vanname*) merupakan salah satu jenis udang yang banyak diminati oleh konsumen luar negeri karena memiliki keunggulan seperti tahan penyakit, pertumbuhannya cepat dan pemeliharaannya lebih mudah. Industri udang Indonesia mengalami masa pasang surut, terutama setelah merebaknya serangan "*White Spot*". Salah satu jenis virus yang menghancurkan usaha budidaya udang windu di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama pantai utara Jawa yang menerapkan pola intensif. Udang windu, merupakan udang yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia, terutama setelah dikeluarkannya SK Menteri Pertanian No. 5/SK/Mentan/Bimas/IV/1984 tanggal 4 Juni 1984.

Namun demikian, beberapa tahun yang lalu industri udang Indonesia secara keseluruhan baik yang dikelola secara tradisional maupun intensif mengalami penurunan produksi sangat drastis akibat serangan penyakit yang mematikan yaitu "*white spot*" (bintik putih) yang banyak menyerang tambak dengan padat penebaran tinggi. Tambak udang yang banyak diserang bintik putih adalah udang windu. Sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensi Indonesia sebagai produsen dan eksportir udang di dunia, serangkaian penelitian dan percobaan terus dilakukan, dan akhirnya melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.41/2001, pada tanggal 12 Juli 2001 Pemerintah Indonesia secara resmi melepas udang vanname sebagai varietas unggul untuk dibudidayakan petambak di Indonesia. Terdapat kelebihan dari udang vanname antara lain lebih tahan terhadap virus bintik putih, pertumbuhan lebih cepat, tahan terhadap kondisi lingkungan, waktu pemeliharaan relatif pendek yakni sekitar 60 hari per siklus. Udang vanname memiliki pasaran yang pesat di tingkat internasional. Bahkan udang ini sudah laku dijual pada saat berukuran 7,0 – 10,0 gram/ekor atau pada saat udang berumur sekitar 60 hari di tambak (Ariawan. 2005, hlm.35).

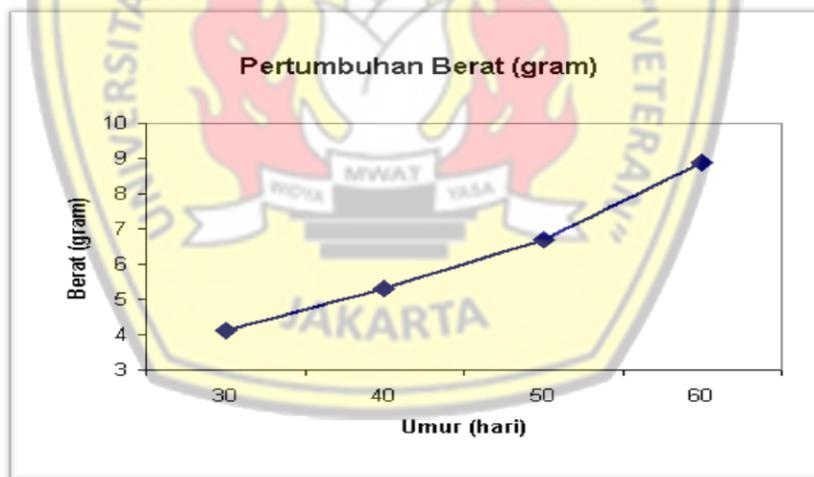
Udang vanname membutuhkan pakan dengan kandungan protein 25-30%, lebih rendah daripada udang windu. Pada umumnya budidaya vannamei di tambak menggunakan teknologi intensif sebagai akibat padat tebar yang tinggi, bisa mencapai 100 – 300 ekor/m²(Ariawan 2005, hlm.35).

Meskipun udang vannamee merupakan udang asli dari belahan bumi lain yaitu dari bagian barat pantai Amerika Latin, mulai dari Peru di sebelah selatan, hingga Meksiko di sebelah utara, udang ini dapat dibudidayakan di daerah tropis, seperti Indonesia (Briggs. 2009, hlm.75).

Tabel 3 Pertumbuhan Berat dan Sintasan Udang Vannamee di Tambak

Sampling	Umur	Pertumbuhan berat (gram)	Perkiraan populasi (%)
1	30	3,80	97
2	40	5,32	95
3	50	6,73	95
4	60	8,97	93

Sumber : KKP



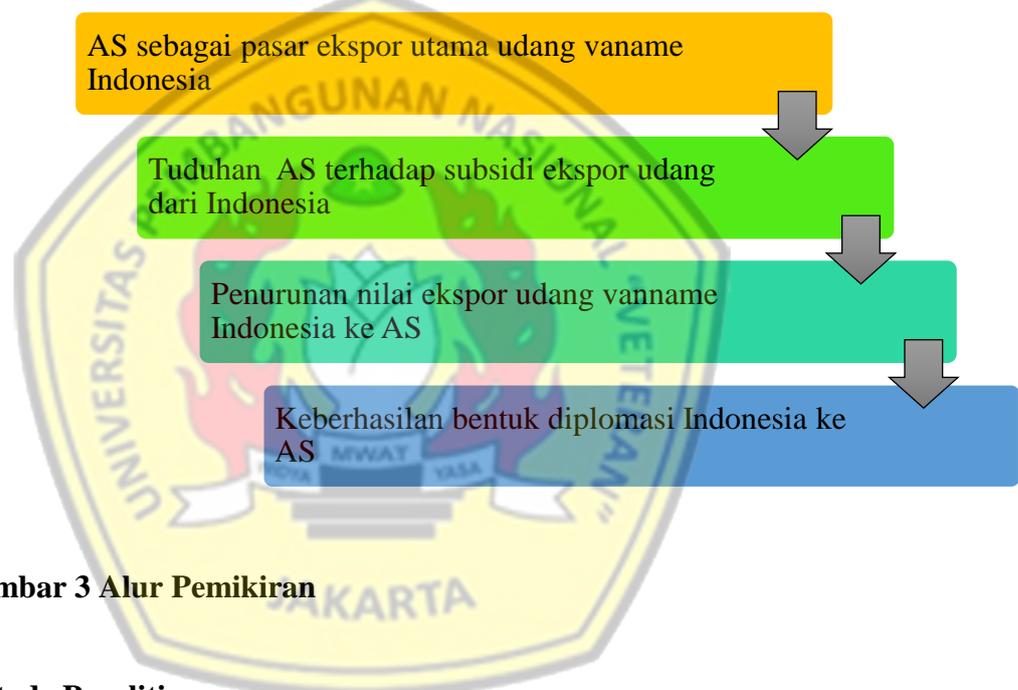
Sumber : KKP

Gambar 2 Pertumbuhan Udang Vannamee di Tambak Teknologi Sederhana

Dari Tabel 3 dan Gambar 2 terlihat bahwa pertumbuhan berat udang vannamee di tambak dengan teknologi sederhana dapat dinyatakan relatif cepat. Apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan berat udang windu yang dipelihara secara intensif atau semi intensif maka pertumbuhan vannamee

tersebut masih lebih cepat. Hal ini dikarenakan masa pemeliharaan udang masih pendek sehingga kandungan sisa pakan. Oleh karena itu lingkungan tambak, baik kualitas tanah maupun air masih sangat mendukung untuk kelangsungan hidup udang. Terjadinya panen dilakukan setelah udang mencapai ukuran rata-rata 10 gram/ekor atau berumur sekitar 60 hari dalam tambak. Bahan dan alat yang digunakan dalam pemanenan adalah jaring kantong dan jala tebar kemudian untuk mengurangi kerusakan atau resiko kemunduran mutu udang maka panen dilakukan pada malam hari atau suhu rendah.

I.7 Alur Pemikiran



Gambar 3 Alur Pemikiran

I.8 Metode Penelitian

I.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian bersifat deskriptif. Untuk menganalisa bentuk hasil diplomasi pemerintah Indonesia dalam menyikapi tuduhan Amerika Serikat terhadap subsidi ekspor komoditas udang vanname Indonesia ke AS periode 2011-2013.

I.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Data primer yang menggunakan data-data resmi volume /nilai ekspor udang Indonesia ke AS pada tahun 2008-2013 dan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Negara. Dalam penelitian ini penulis telah melakukan wawancara dengan Bapak Yustinus Edy Parmono selaku Kasubdit Kepala Seksi Pasar Luar Negeri dan Bapak Alexander Luankali selaku Kepala Seksi Pasar Luar Negeri di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Direktorat Pemasaran Luar Negeri.
- b. Data Sekunder yang diperoleh dengan melalui studi pustaka (*library research*) dengan bahan pustaka seperti buku Hukum Perdagangan Internasional karya Muhammad Sood, S.H, M.H, jurnal ilmiah Persengketaan Perdagangan Ekspor Udang Indonesia ke Amerika Serikat karya M Kharif Rahman, surat kabar, bulletin, media massa majalah Tempo, artikel dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan situs internet resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia www.kkp.go.id untuk memperoleh data yang lengkap, akurat dan relevan.

I.8.3 Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan akan dianalisa dengan menggunakan teori dan konsep sebagai panduan untuk menganalisis data-data yang telah ada. Kemudian disaring lagi sehingga mendapatkan data yang bisa sesuai dengan permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.

I.9 Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas pemahaman terhadap skripsi ini, maka penulis akan membaginya berdasarkan sistematika berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama akan dijelaskan, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka , kerangka pemikiran, alur pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PERDAGANGAN INDONESIA KE AMERIKA SERIKAT DALAM KOMODITAS UDANG VANNAME TAHUN 2011-2012

Pada bab kedua, akan menjelaskan dinamika perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat di tahun 2011-2012 dimana pada tahun tersebut yang menyebabkan bahwa Indonesia telah dituduh oleh AS terhadap ekspor udang vanname Indonesia sehingga terjadi penurunan nilai ekspor udang di Indonesia.

BAB III BENTUK DIPLOMASI INDONESIA KE AMERIKA SERIKAT 2013

Membahas bagaimana bentuk diplomasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi tuduhan Amerika Serikat terhadap subsidi ekspor udang Indonesia. Dan menjelaskan hasil dari diplomasi Pemerintah Indonesia terhadap tuduhan subsidi ekspor udang. Serta menjelaskan bagaimana perkembangan perdagangan Indonesia dengan AS setelah terjadinya diplomasi Pemerintah Indonesia.

BAB IV KESIMPULAN

Dalam bab ini, berisikan kesimpulan dan analisa penulisan dalam penelitian hasil diplomasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap tuduhan subsidi ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN